



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN IV

2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Papua II



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN IV

2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Papua II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Triwulan IV (Oktober-Desember 2025) di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan sistem kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan SAKIP.

Laporan Triwulan ini memuat uraian mengenai target pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan, capaian kinerja program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi beserta rencana tindak lanjut, serta kesimpulan dan saran. Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan ini, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan laporan pada periode selanjutnya. Dengan disusunnya Laporan Triwulan IV Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.

Manokwari, 31 Desember 2025
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Papua II



Ir. P. M. Desyarmeda Killian, S.T., M.Si.
NIP. 197912272006052001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi.....	2
I.3 Struktur Organisasi	3
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	7
II.1 Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.....	7
II.2 Capaian Target Triwulan	11
II.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan.....	18
BAB III PENUTUP.....	20
III.1 Rencana Tindak Lanjut	20
III.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.....	22
LAMPIRAN	26
Lampiran 1. Surat Permohonan Penambahan Pegawai	26
Lampiran 2. Adendum Tambah Waktu Rusun DOB	27
Lampiran 3. SK Tahap IV BSPS Pergantian 1 CPB	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Balai P3KP Papua II	8
Tabel 2. Capaian Target Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025	11
Tabel 3. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat Tahun 2025	11
Tabel 4. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat Tahun 2025 (Jika Meubelair Tidak Dihitung).....	12
Tabel 5. Rincian Capaian Target Kinerja BP3KP Papua II	13
Tabel 6. Rincian Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat	15
Tabel 7. Rincian Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat (Jika Meubelair Tidak Dihitung)	16
Tabel 8. Rencana Tindak Lanjut	20
Tabel 9. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	22

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui penyediaan akses hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan nyaman.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pembangunan perumahan bertujuan untuk menjamin setiap warga negara dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, terencana, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, diperlukan penerapan prinsip pembangunan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang diperkuat oleh dimensi kelembagaan. Prinsip tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Selain itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah, memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II berkomitmen untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II pada Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan terpenuhinya seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan dan pemeliharaan rumah susun, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi, telah berhasil direalisasikan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan, serta komitmen terhadap prinsip transparansi, integritas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan.

I.2 Tugas dan Fungsi

I.2.1 Tugas Balai P3KP Papua II

Balai P3KP Papua II memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada Permen PKP No. 1 Tahun 2025, dimana Balai P3KP Papua II termasuk kedalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan pascakerusuhan sosial, serta fasilitasi serah terima aset.

I.2.2 Fungsi Balai P3KP Papua II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

I.3 Struktur Organisasi

I.3.1 Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan dan administrasi Balai. Ruang lingkup tugas tersebut mencakup penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, serta administrasi sumber daya manusia. Selain itu, Subbagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan serta koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik, serta penyediaan layanan hukum bagi Balai.

I.3.2 Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan

permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta melakukan koordinasi dan penataan kawasan permukiman pascabencana maupun pascakerusuhan sosial. Selain itu, Seksi Pelaksanaan Wilayah I juga bertugas melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta fasilitasi penghuniannya. Seksi ini turut melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta melakukan verifikasi data pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

I.3.3 Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, serta melakukan koordinasi penyediaan lahan untuk kegiatan pembangunan perumahan. Selain itu, Seksi ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta fasilitasi penghuniannya. Seksi Pelaksanaan Wilayah II turut melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan, sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

I.3.4 Kepala Satuan Kerja

Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat dan memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Kepala Satuan Kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada pejabat inti di lingkungan satuan kerja guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pencapaian keluaran (output) yang telah ditetapkan.

3. Menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Menyusun rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
5. Melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

I.3.5 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas dan fungsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Balai P3KP Papua II, terdapat 4 (empat) PPK, yaitu:

1. PPK Balai;
2. PPK Perencanaan dan Pengendalian;
3. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus; dan
4. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Keempat PPK tersebut memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2. Menyusun, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perjanjian/kontrak.
4. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan serta rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
5. Melaksanakan penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa serta aset lainnya melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

I.3.6 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

BP3KP Papua II memiliki 2 (dua) orang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang masing-masing berkedudukan pada Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat. PPSPM merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran serta menerbitkan perintah pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPSPM mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.
2. Menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

I.3.7 Bendahara

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki 2 (dua) orang Bendahara yang masing-masing berkedudukan pada Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat. Bendahara melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang dan/atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bendahara mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan dan pembukuan atas uang dan/atau surat berharga.
2. Melaksanakan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran hak tagih pihak yang berhak menerima pembayaran.
4. Melakukan pemeriksaan kesesuaian pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA

II.1 Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Target Kinerja Triwulan IV disusun berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Papua II. Dokumen Rencana Aksi Kinerja tersebut ditetapkan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2025 antara Kepala BP3KP Papua II dan masing-masing Direktur Jenderal, yang bersumber dari lima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Target Kinerja Triwulan IV pada BP3KP Papua II dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target Kinerja Balai P3KP Papua II

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
SEKRETARIAT JENDERAL											
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal										
1	Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	Melaksanakan layanan perkantoran	-	-	-	-	45	45	100	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN											
SK-1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni										
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	45	45	100	100
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Menyusun laporan penyelenggaraan Klinik PKP	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	-	-	45	45	100	100
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-3	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah Yang Terlayani PSU Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68 Unit	Menyelesaikan Pembangunan PSU di Perumahan Fajar Sowi Damai	-	-	-	-	45	45	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN											
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	-	-	-	45	45	100	100

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan											
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132 Unit	Menyelesaikan Pembangunan Rusun (MYC 2024-2025)					45	45	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN											
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Menyusun laporan kebijakan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	-	-	-	-	45	45	100	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan											
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-3 Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan											
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Menyusun laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	-	-	-	-	45	45	100	100
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	-	-	-	-	45	45	100	100
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO											
SK-1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efektif dan Akuntabel										
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Laporan	Menyusun laporan keterbukaan informasi publik,	-	-	-	-	45	45	100	100

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
			transparansi, dan akuntabilitas kinerja								
SK-2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan	Menyusun laporan manajemen risiko serta pencegahan korupsi	-	-	-	-	45	45	100	100

II.2 Capaian Target Triwulan

Capaian Kinerja Triwulan IV (Oktober – Desember 2025) Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Papua Barat Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Rencana Aksi Kinerja, menunjukkan bahwa realisasi keuangan **BP3KP Papua II** mencapai **89,59%** dari target rencana sebesar 100% dan realisasi fisik mencapai 100%. Sementara itu, realisasi keuangan **Satker PKP Papua Barat** mencapai **94,37%** dari rencana 100,00%, sedangkan realisasi fisik mencapai 93,08% dari target rencana sebesar 100,00%. Adapun untuk realisasi keuangan terdapat anggaran yang tidak terserap yaitu kegiatan pengadaan meubelair Rumah Susun DOB Papua Barat Daya sebesar Rp. 4.048.565.000,- dikarenakan sudah dialokasikan pada Tahun Anggaran sebelumnya. Selain itu, untuk realisasi fisik belum mencapai 100,00% akibat adanya pekerjaan fisik BPS yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Realisasi anggaran dan fisik dapat dilihat pada Tabel 3 dan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 2. Capaian Target Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025

DIPA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN PROGRES (%)		SISA ANGGARAN (Rp.)
			KEUANGAN	FISIK	
Sekretariat Jenderal	1.083.149.000	945.424.093	87,28	100	137.724.907
Dirjen Kawasan Permukiman	702.761.000	677.735.042	96,44	100	25.025.958
Dirjen Perumahan Perdesaan	426.890.000	383.775.914	89,90	100	43.114.086
Dirjen Perumahan Perkotaan	1.431.262.000	1.236.354.008	86,38	100	194.907.992
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	293.371.266	96,67	100	10.094.734
Total	3.947.528.000	3.536.660.323	89,59	100	410.867.677

Tabel 3. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat Tahun 2025

DIPA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN PROGRES (%)		SISA ANGGARAN (Rp.)
			KEUANGAN	FISIK	
Sekretariat Jenderal	677.841.000	562.366.046	82,96	100	115.474.954

DIPA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN PROGRES (%)		SISA ANGGARAN (Rp.)
			KEUANGAN	FISIK	
Dirjen Kawasan Permukiman	18.731.223.000	18.437.388.591	98,43	66,27	293.835.226
Dirjen Perumahan Perdesaan	69.875.925.000	65.340.755.406	93,51	100	4.535.169.594
Dirjen Perumahan Perkotaan	2.108.609.000	1.935.319.796	91,78	100	173.289.204
Total	91.393.598.000	86.275.829.022	94,40	93,08	5.117.768.978

Adapun jika anggaran meubelair Rumah Susun DOB Papua Barat Daya sebesar Rp. 4.048.565.000,- ditiadakan, maka realisasi keuangan mencapai 98,78% dengan total anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.069.203.978,-. Selain itu, realisasi fisik mencapai 92,77% dari target rencana sebesar 100%. Realisasi anggaran dan fisik dengan ditiadakannya anggaran meubelair **dapat dilihat pada Tabel 4** dan secara rinci **dapat dilihat pada Tabel 7**.

Tabel 4. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat Tahun 2025 (Jika Meubelair Tidak Dihitung)

DIPA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN PROGRES (%)		ANGGARAN TIDAK TERSERAP (RP)
			KEUANGAN	FISIK	
Sekretariat Jenderal	677.841.000	562.366.046	82,96	100	115.474.954
Dirjen Kawasan Permukiman	18.731.223.000	18.437.388.591	98,43	66,27	293.835.226
Dirjen Perumahan Perdesaan	65.827.360.000	65.340.755.406	93,51	100	486.604.594
Dirjen Perumahan Perkotaan	2.108.609.000	1.935.319.796	91,78	100	173.289.204
Total	87.345.033.000	86.275.829.022	98,78	92,77	1.069.203.978

Tabel 5. Rincian Capaian Target Kinerja BP3KP Papua II

Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (Rp.)		Fisik (%)		
					RN	RL	RN	RL	
SEKRETARIAT JENDERAL									
SK-1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal								
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.083.149.000	945.424.093	100	87,28	100	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
SK-1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan	287.620.000	270.718.421	100	94,12	100	100
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Laporan	50.000.000	43.264.177	100	86,53	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	365.141.000	363.752.444	100	99,62	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN									
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan	426.890.000	383.775.914	100	89,90	100	100

Program/Kegiatan/KRO/RO		Vol	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (Rp.)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	536.646.000	494.392.000	100	92,13	100	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	310.911.000	306.900.295	100	98,71	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	271.235.000	216.963.000	100	79,99	100	100
SK-3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Laporan	312.470.000	218.098.713	100	69,80	100	100
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO									
SK-1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efektif Dan Akuntabel								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Laporan	129.233.000	127.662.407	100	98,78	100	100
SK-2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Laporan	174.233.000	165.708.859	100	95,11	100	100
Total				3.947.528.000	3.536.660.323	100,00	89,59	100,00	100,00

Tabel 6. Rincian Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Revisi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL										
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal									
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	536.481.000	677.841.000	562.366.046	100,00	82,96	100,00	100,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN										
SK-1	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68	Unit	792.320.000	792.320.000	788.898.297	100,00	99,57	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	172.394.000	172.394.000	161.587.477	100,00	93,73	100,00	100,00
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500	Unit	17.766.509.000	17.766.509.000	17.486.902.000	100,00	98,43	100,00	64,43
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN										
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan.									
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	203.299.000	203.299.000	179.262.452	100,00	88,18	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan									
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132	Unit	69.672.626.000	69.672.626.000	65.161.492.954	100,00	93,53	100,00	100,00
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan									

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Revisi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							RN	RL	RN	RL
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	839.337.000	839.337.000	668.820.409	100,00	79,68	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.									
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40	Unit	1.269.272.000	1.269.272.000	1.266.499.387	100,00	99,78	100,00	100,00
TOTAL				91.252.238.000	91.393.598.000	86.275.829.022	100,00	94,40	100,00	93,08

Tabel 7. Rincian Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat (Jika Meubelair Tidak Dihitung)

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Revisi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL										
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal									
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	536.481.000	677.841.000	562.366.046	100,00	82,96	100,00	100,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN										
SK-1	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68	Unit	792.320.000	792.320.000	788.898.297	100,00	99,57	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	172.394.000	172.394.000	161.587.477	100,00	93,73	100,00	100,00
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500	Unit	17.766.509.000	17.766.509.000	17.486.902.000	100,00	98,43	100,00	64,43

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Revisi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							RN	RL	RN	RL
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN										
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan.									
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	203.299.000	203.299.000	179.262.452	100,00	85,09	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan									
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132	Unit	65.624.061.000	65.624.061.000	65.161.492.954	100,00	99,30	100,00	100,00
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	839.337.000	839.337.000	668.820.409	100,00	79,68	100,00	100,00
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.									
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40	Unit	1.269.272.000	1.269.272.000	1.266.499.387	100,00	99,78	100,00	100,00
TOTAL				87.203.673.000	87.345.033.000	86.275.829.022	100,00	98,78	100,00	92,77

II.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa capaian target kinerja yang mengacu pada Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam proses pencapaian target tersebut masih terdapat beberapa permasalahan, khususnya pada pelaksanaan paket pekerjaan fisik, dengan uraian sebagai berikut:

II.3.1 PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari berdampak pada pelaksanaan pekerjaan kawasan, seperti pekerjaan *rigid pavement*, *paving block*, kanstin, dan penanaman, sehingga hasil pekerjaan belum dapat terlaksana secara optimal.
2. Anggaran kegiatan pengadaan meubelair tidak terserap karena kebutuhan tersebut telah dialokasikan dan direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

II.3.2 PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

1. Terdapat penurunan nilai upah tukang di wilayah daratan/perkotaan dari semula sebesar Rp5.000.000,00 menjadi Rp3.500.000,00, yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS, mengingat volume pekerjaan mengalami peningkatan sementara nilai upah justru menurun.
2. Berdasarkan petunjuk teknis, fasilitator diperkenankan menyesuaikan biaya operasional dan transportasi sesuai dengan kategori wilayah. Namun demikian, keterbatasan dan penguncian anggaran mengakibatkan penyesuaian tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan di kalangan fasilitator yang bertugas di wilayah kepulauan dan perkotaan.
3. Terdapat potensi kelangkaan material bangunan, khususnya kayu, pada akhir tahun anggaran.
4. Pekerjaan BSPS berpotensi tidak dapat diselesaikan sepenuhnya hingga akhir Tahun Anggaran 2025.

- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1. Tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan fisik PSU tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

BAB III PENUTUP

III.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, selanjutnya disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 8. Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK BALAI		
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN		
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS		
1	Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari berdampak pada pelaksanaan pekerjaan kawasan, seperti pekerjaan rigid pavement, paving block, kanstin, dan penanaman, sehingga hasil pekerjaan belum dapat terlaksana secara optimal	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah
2	Dana mebelair tidak terserap dikarenakan sudah dilakukan penyerapan di tahun anggaran sebelumnya.	
PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN		
BSPS		
1	Terjadi penurunan nilai upah tukang di wilayah daratan/perkotaan dari semula sebesar Rp5.000.000,00 menjadi Rp3.500.000,00, yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS, mengingat volume pekerjaan mengalami peningkatan sementara nilai upah justru menurun.	Melakukan proses komunikasi dan koordinasi kepada para pihak khususnya pemerintah kampung untuk dapat membantu upah tukang.
2	Berdasarkan petunjuk teknis, fasilitator diperkenankan menyesuaikan biaya operasional dan transportasi sesuai dengan kategori wilayah. Namun demikian, keterbatasan dan penguncian	Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah, melalui usulan tambahan operasional bagi fasilitator di wilayah kepulauan.

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	anggaran mengakibatkan penyesuaian tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan di kalangan fasilitator yang bertugas di wilayah kepulauan dan perkotaan.	
3	Terdapat potensi kelangkaan material bangunan, khususnya kayu, pada akhir tahun anggaran.	Melakukan proses percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan dan tahapan program melalui wasdal Tim Rumah Swadaya, Satker dan Balai serta Surat Kabalai BP3KP Papua II kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI Kabupaten Fakfak Perihal Dukungan Penyediaan Kayu pada Program BSPS di Kabupaten Fakfak.
4	Pekerjaan BSPS berpotensi tidak dapat diselesaikan sepenuhnya hingga akhir Tahun Anggaran 2025.	Berdasarkan Surat Ditjen TKPR No. RU 1003-Dt/206 Tahun 2025 poin d dan e, dalam hal PB tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik sampai dengan akhir TA. 2025, maka PB diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal 60 hari setelah Tahun Anggaran 2025 berakhir.
PSU		
1	Tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan fisik PSU tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah.

III.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Adapun bukti tindak lanjut atas permasalahan pada Triwulan sebelumnya, yaitu Triwulan III (Juli–September 2025), dalam rangka pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, sebagai berikut:

Tabel 9. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Triwulan Sebelumnya (TW III)				Triwulan IV		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK BALAI						
1	Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, yang berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.	Mengajukan permohonan penambahan pegawai pada Balai P3KP Papua II sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja yang ada.	Surat Kepala Balai P3KP Papua II No. 11301/ND/Bk19/2025 Tentang Permohonan Penambahan Pegawai (dapat dilihat pada Lampiran 1).			
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN						

Triwulan Sebelumnya (TW III)				Triwulan IV		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS						
1	Intensitas hujan yang tinggi hampir setiap hari mengakibatkan pekerjaan Kawasan seperti pekerjaan rigid, paving block, Kanstin dan tanaman menjadi tidak maksimal.	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah	Melakukan addendum penambahan waktu pada Bulan Agustus 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2.	1	Intensitas hujan yang tinggi hampir setiap hari mengakibatkan pekerjaan Kawasan seperti pekerjaan rigid, <i>paving block</i> , Kanstin dan tanaman menjadi tidak maksimal.	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah
				2	Dana mebelair tidak terserap dikarenakan sudah dilakukan penyerapan di tahun anggaran sebelumnya.	
PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN						
BSPS						
1	Terdapat 1 PB tanah bersengketa dan mundur di Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak.	Surat usulan perubahan dan pergantian telah disampaikan ke Pusat, menunggu Instruksi Verifikasi	Terdapat SK Pusat terbaru mengenai penggantian 1 CPB pada Tahap IV dapat dilihat pada Lampiran 3.	1	Terdapat penurunan nilai upah tukang pada wilayah Daratan/ Perkotaan dari SEMULA senilai Rp. 5.000.000-, MENJADI senilai Rp. 3.500.000-. Hal ini berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS, mengingat volume pekerjaan bertambah sementara upah tukangny justru menurun.	Melakukan proses komunikasi dan koordinasi kepada para pihak khususnya pemerintah kampung untuk dapat membantu upah tukang.

Triwulan Sebelumnya (TW III)				Triwulan IV		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
2	Lokasi yang berada di pulau-pulau kecil menghambat pelaksanaan sosialisasi, terdapat pergantian CPB sebanyak 1 orang.	Mengajukan pergeseran anggaran untuk wasdal, Penggantian CPB dan penyusunan Surat Penetapan CPB Tahap IV.	Terdapat SK Pusat terbaru mengenai penggantian 1 CPB pada Tahap IV dapat dilihat pada Lampiran 2.	2	Fasilitator berdasarkan juknis diperkenankan operasionalnya/ transportasi disesuaikan dengan kategori wilayah namun anggaran sudah terbatas/dikunci. Menimbulkan kecemburuan di kalangan fasilitator yang ditugaskan di wilayah kepulauan dan perkotaan.	Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah, melalui usulan tambahan operasional bagi fasilitator di wilayah kepulauan.
				3	Potensi kelangkaan kayu serta beberapa bahan bangunan pada akhir tahun.	Melakukan proses percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan dan tahapan program melalui wasdal Tim Rumah Swadaya, Satker dan Balai serta Surat Kabalai BP3KP Papua II kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI Kabupaten Fakfak Perihal Dukungan Penyediaan Kayu pada Program BSPS di Kabupaten Fakfak.

Triwulan Sebelumnya (TW III)				Triwulan IV		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
				4	Pekerjaan berpotensi tidak selesai di akhir tahun anggaran 2025.	Berdasarkan Surat Ditjen TKPR No. RU 1003-Dt/206 Tahun 2025 poin d dan e, dalam hal PB tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik sampai dengan akhir TA. 2025, maka PB diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal 60 hari setelah Tahun Anggaran 2025 berakhir.
PSU						
				1	Intensitas hujan mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal.	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penambahan Pegawai



Yth. : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dit. : Kepala Bala. Pelayanan Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Papua I
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : PERMOROHAN PENAMBAHAN PEG/MI
Tanggal : 18 Juli 2025

Mari kita lanjut surat dari Kepala Bina Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tenaga Kerja nomor UM0402-Sa/03 tanggal 3 Juli 2025 tentang Rapat Koordinasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Pegawai di Hotel Mahakarya Pelayaran Perumihan dan Kawasan Perbukitan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang berada di DP3KP Papua sebanyak 34 (tiga puluh empat) pegawai dengan rincian sebagai berikut :

[illegible]

SARFIS (SARFIS) - SARFIS (SARFIS) - SARFIS (SARFIS) - SARFIS (SARFIS) - SARFIS (SARFIS)				
NO	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
1	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
2	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
3	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
4	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
5	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
6	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
7	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
8	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
9	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
10	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
11	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
12	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
13	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
14	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
15	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
16	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
17	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
18	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
19	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
20	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
21	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
22	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
23	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
24	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
25	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
26	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
27	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
28	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
29	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
30	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
31	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
32	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
33	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
34	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
35	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
36	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
37	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
38	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
39	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
40	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
41	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
42	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
43	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
44	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
45	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
46	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
47	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
48	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
49	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
50	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
51	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
52	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
53	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
54	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
55	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
56	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
57	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
58	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
59	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
60	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
61	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
62	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
63	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
64	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
65	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
66	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
67	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
68	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
69	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
70	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
71	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
72	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
73	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
74	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
75	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
76	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
77	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
78	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
79	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
80	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
81	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
82	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
83	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
84	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
85	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
86	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
87	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
88	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
89	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
90	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
91	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
92	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
93	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
94	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
95	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
96	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
97	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
98	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
99	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
100	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA

Declarations: no conflicts of interest declared.

[illegible]

2. **Mengingat Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS):** sudah dalam tahap persiapan pelaksanaan dan mengingat keterbatasan SDM pada BP3KP Pasovili dan perantara transfer ilmu dari Tenaga Ahli di Program BSPS kepada CPNS yang akan ditempatkan pada Balai Palasana, Rongedadih, Pontianak dan Kawasan Permukiman Papua II, kami mohon untuk dapat mengalokasikan Tenaga Ahli BSPS pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat.

3. Adapun kendala yang akan dihadapi jika tidak ada Tenaga Ahli BOPD maka program berjalan kurang optimal karena tenaga yang ada masih proses belajar dan belum berpengalaman dengan kondisi sosial dan geografis wilayah provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini. Kami berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Koran Bala Polikasa Panyecian
Perumahan car Kaeston Pannukinan
Pasusi



P. M. Desyarnada Kilian, S.T., M.Si.
NIP 167912272008052001

1. Daerah Jendral Kawasan Perbukitan Kontinental Persebaran dan Kawasan Perbukitan;

Lampiran 2. Adendum Tambah Waktu Rusun DOB

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN BALAI PELAKSANA PENTANAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II Jl. Raya Trikora, Puncak Jaya, Kota Jayapura, Papua Iri 99312 Telp. (0937) 841111 Fax. (0937) 841112 Email: kppk@kppk.go.id		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN BALAI PELAKSANA PENTANAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II Jl. Raya Trikora, Puncak Jaya, Kota Jayapura, Papua Iri 99312 Telp. (0937) 841111 Fax. (0937) 841112 Email: kppk@kppk.go.id	
 ADDENDUM KONTRAK VI		ADDENDUM KONTRAK VI Nomor: 01/HK.03.01/KTRK.ADO.6/RSN.DOB.PBD/VIII/2025 Tanggal: 12 Agustus 2025	
 ADDENDUM KONTRAK VI		TERHADAP ADDENDUM KONTRAK V SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya Nomor : 01/HK.03.01/KTRK.ADO.5/RSN.DOB.PBD/VI/2025 tanggal 05 Juli 2025	
Paket : Pembangunan Rumah Susun Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya No. Kontrak : 01/HK.03.01/KTRK.ADO.6/RSN.DOB.PBD/VIII/2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Nilai Kontrak : Rp. 110.637.000.000,- (Seratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) Pemilik Jasa : PT. NINDYA KARYA Alamat : J. Lelend Haryono MI Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta		SURAT PERJANJIAN ini dibuat untuk selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Seng pada hari Selasa tanggal Dua Belas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Perubahan Kontrak Nomor: 05/BA/BA/18/4/2025 tanggal 11 Agustus 2025, dan berdasarkan Penetapan Perubahan Addendum Kontrak VI pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun DOB Papua Barat Daya tanggal 11 Agustus 2025 oleh Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat, dan berdasarkan Surat Penunjukan Pemilik Bangun/Jasa (SPPEJ) Nomor : 01/HK.03.01/SPPEJ/RSN.DOB.PBD/VI/2024 tanggal 03 September 2024 dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR 020-MU/717 Tanggal 05 Agustus 2024 Hal Penetapan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Rumah Susun DOB Papua Barat Daya beserta Managemen Konstruksi antara, antara Nama : Heli Andoni, S.T., M.A. NIP : 19930122 20021 1 004 Jabatan : PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Berkedudukan di : Jalan Merdeka, Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman c.q. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman c.q. Satuan Kerja	
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2024-2025		Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN Tetap Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBAYARAN DAN PEMBAYARAN Tetap.	
Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK Tetap. Pasal 5 MASA KONTRAK Semula (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 362 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua) hari kalender; (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender. Memadi (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 453 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga) hari kalender; (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.		Untuk dan atas nama Penyedia PT. NINDYA KARYA  SEPTIAN FAKHRUDDIN Senior Vice President Divisi Gedung Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus  HELIONDONI, S.T., M.A. NIP. 19930122 20021 1 004 Mengetahui Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat  FERRY MOYA S.T. NIP. 19821029 20112 1 001	

Lampiran 3. SK Tahap IV BSPS Pergantian 1 CPB



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Nomor : RU 10-DP/636
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Pesisir TA. 2025 Tahap IV

Jakarta, 21 November 2025

Yth. Daftar Penerima Surat Terlampir di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor RU10-DP/640 tanggal 7 November 2025, Hal Instruksi Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Pesisir TA.2025 Tahap II, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Pesisir, bersama ini kami sampaikan Penetapan Calon Penerima Bantuan Pengganti Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Pesisir TA. 2025 sejumlah 309 unit dengan sebaran sebagai berikut:

No	Provinsi	Unit
1	Bangka Belitung	4
2	Lampung	17
3	Kalimantan Barat	11
4	Jawa Timur	244
5	Nusa Tenggara Timur	17
6	Sulawesi Utara	14
7	Maluku Utara	1
8	Papua Barat	1
Total		309

Alokasi jumlah unit dan calon penerima BSPS ini akan menjadi dasar pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2025 di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Pesisir, bersama ini kami sampaikan Penetapan Calon Penerima Bantuan Pengganti Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Pesisir TA. 2025 sejumlah 309 unit dengan sebaran sebagai berikut:

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,

Ir. Fikrah Nur, M.Si.
NIP. 196704191994031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
4. Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan;
5. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan;
6. Pjt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman;
7. Para Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
8. Para PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Lampiran I

Surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Nomor : RU 10-DP/636
Tanggal : 21 November 2025

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V;
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV;
4. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II;
5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
6. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DISTRIK	DESA / KELURAHAN	UNIT
1	JAWA TIMUR	KAB. BOJONEGORO	2 TOROGONG SELATAN	1 TAYOGAN I	1
			1 PORAJAGADAN	1 TORAJA	1
			1 TOMINI	1 MILANODUAK BARAT	2
			1 KAB. BOJONEGORO	1 BILALANG	1
			1 BILALANG	1 BILALANG II UTARA	1
			2 GULAK	1 ISAT	1
			3 BOLAANG	1 INCHOBOTO	1
			4 SANG TOMIOLANO	1 BAILANG	1
			5 DUMOGA TENGGARA	1 DUMARA	1
			1 MALUKU UTARA	1 KAB. HALMAHERA UTARA	1
			1 KAB. HALMAHERA UTARA	1 TUBERO BARAT	1
			1 KAB. HALMAHERA UTARA	1 BUKAMAU	1
			1 KAB. HALMAHERA UTARA	1 KAB. HALMAHERA UTARA	1
			1 KAB. HALMAHERA UTARA	1 KAB. HALMAHERA UTARA	1
			1 KAB. HALMAHERA UTARA	1 KAB. HALMAHERA UTARA	1
TOTAL		19	48	76	309

Tautan Daftar Calon Penerima Bantuan BSPS:
<https://bit.ly/LampiranCPB2025>

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2025 PROVINSI PAPUA BARAT							
NO	NOMOR DOKUMEN	NAMA	JENIS KELOMPOK RUMAH	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA/ KELURAHAN	KABUPATEN/ KOTA
1	00000001	BARUA SUKSES	1	000000000000000000	BARUA SUKSES RT 001	BARUA SUKSES	KAB. TANE PABE



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II